

Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Penganggaran Publik

Analysis of Public Budgeting Transparency and Accountability

Nurlina¹

¹Politeknik Wahdah Islamiyah Makassar, Makassar, Indonesia;

Email: nurlina.lina290887@gmail.com

Article History

Received : 2025-10-19

Revised : 2025-10-25

Accepted: 2025-10-30

Published: 2025-11-01

Keywords:

Budget Transparency;

Public Accountability;

E-Budgeting;

Good Governance;

*Regional Financial
Management*

Corresponding author:

nurlina.lina290887@gmail.com

Paper type:

Research paper



**POLITEKNIK WAHDAH
ISLAMIYAH MAKASSAR**

Program Studi Manajemen Keuangan
Sektor Publik, Politeknik Wahdah
Islamiyah

Abstract

This study aims to analyze the implementation of transparency and accountability in public budgeting in Indonesia through the implementation of an e-budgeting system. This study uses a literature review method by reviewing various national and international studies published between 2019 and 2025 that are relevant to digital-based public financial governance. The results of the study indicate that e-budgeting contributes significantly to increasing the efficiency of the budgeting process, strengthening information transparency, and creating a digital audit trail that encourages government accountability. This system also allows the public to access budget data in real time, thereby expanding the space for public participation in fiscal policy oversight. However, its implementation still faces various challenges, including limited technological infrastructure, low digital literacy of civil servants, suboptimal data quality, and bureaucratic resistance to change. This study confirms that the success of transparency and accountability is not solely determined by technological innovation but also requires strengthening human resource capacity, consistent political commitment, and a bureaucratic culture that supports openness. These findings are expected to contribute to the development of policy strategies to realize more effective, participatory, and integrity-based public financial governance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran publik di Indonesia melalui implementasi sistem e-budgeting. Kajian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai penelitian nasional dan internasional terbitan 2019–2025 yang relevan dengan tata kelola keuangan publik berbasis digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa e-budgeting berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi proses penganggaran, memperkuat keterbukaan informasi, serta menciptakan jejak audit digital yang mendorong akuntabilitas pemerintah. Sistem ini juga memungkinkan masyarakat mengakses data anggaran secara real-time, sehingga memperluas ruang partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan fiskal. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital aparatur, kualitas

data yang belum optimal, serta resistensi birokrasi terhadap perubahan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan transparansi dan akuntabilitas tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologi, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas SDM, komitmen politik yang konsisten, dan budaya birokrasi yang mendukung keterbukaan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi kebijakan dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang lebih efektif, partisipatif, dan berintegritas.

Copyright @ 2025 Authors.

Cite this article:

Nurlina. (2025). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Penganggaran Publik. *AMANAHA: Jurnal Manajemen Keuangan Sektor Publik*, 1(1), 39-51. <https://journal.uwais.ac.id/index.php/amanah/article/view/10>.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. Pendahuluan

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kedua prinsip ini berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan, program, dan penggunaan anggaran pemerintah dapat diketahui, diawasi, serta dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, penerapan transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Prinsip tersebut tidak hanya menjadi dasar etika birokrasi, tetapi juga menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan reformasi administrasi publik.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan luas dalam mengelola keuangan publik sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah masing-masing. Kewenangan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran, namun sekaligus menuntut penerapan transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat guna mencegah terjadinya penyimpangan dan korupsi. Oleh karena itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial dan kontrol publik terhadap penggunaan sumber daya negara.

Dalam dua dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara yang berorientasi pada digitalisasi dan efisiensi birokrasi. Salah satu langkah strategis adalah penerapan *e-government* melalui sistem *e-budgeting* dan *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)*. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan

keterbukaan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan publik secara daring dan terintegrasi antarinstansi. Penerapan *e-budgeting* tidak hanya bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran, tetapi juga untuk memperkuat prinsip *open government*—yakni pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Keterbukaan dalam penganggaran publik memiliki fungsi strategis dalam mendorong efisiensi dan meningkatkan kepercayaan publik. Melalui transparansi, masyarakat dapat memantau bagaimana sumber daya publik dialokasikan dan dimanfaatkan, sementara akuntabilitas memastikan bahwa setiap kebijakan dan hasil kegiatan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Prinsip ini juga diperkuat oleh kerangka hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kedua regulasi tersebut memberikan landasan yuridis bagi penerapan sistem digital pemerintahan yang lebih terintegrasi dan terbuka.

Meskipun demikian, implementasi transparansi dan akuntabilitas di sektor publik masih menghadapi sejumlah kendala. Tantangan utama meliputi rendahnya literasi anggaran masyarakat, ketimpangan infrastruktur teknologi informasi antarwilayah, serta keterbatasan kapasitas aparatur dalam mengelola sistem digital. Selain itu, masih ditemukan resistensi birokrasi dan lemahnya komitmen politik dari sebagian pejabat publik terhadap keterbukaan informasi. Partisipasi masyarakat dalam forum seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) juga belum optimal dan cenderung bersifat formalitas, sehingga aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan fiskal daerah.

Di sisi lain, capaian positif juga menunjukkan adanya kemajuan dalam penerapan prinsip akuntabilitas keuangan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2023, lebih dari 90% pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Hal ini menunjukkan peningkatan dalam transparansi pelaporan dan tata kelola keuangan, meskipun penguatan pada aspek akuntabilitas kinerja dan pengawasan publik masih diperlukan agar reformasi birokrasi berjalan lebih substantif dan tidak hanya administratif.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian terhadap penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem penganggaran publik di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan sistem *e-budgeting* dan kebijakan keterbukaan informasi publik telah mendukung tercapainya prinsip *good governance*. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat integritas, efektivitas, dan partisipasi publik dalam tata kelola keuangan negara.

Secara akademik, hasil kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai transparansi fiskal dan akuntabilitas pemerintahan daerah di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah pusat dan daerah dalam

memperbaiki mekanisme pelaksanaan *e-budgeting*, meningkatkan kualitas informasi publik, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam seluruh siklus anggaran. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap upaya mewujudkan tata kelola keuangan publik yang lebih terbuka, partisipatif, dan berintegritas.

2. Literature Review

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua elemen utama dalam konsep *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. *Good governance* sendiri dipahami sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada keadilan, keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas dalam setiap proses kebijakan publik. Prinsip ini menekankan bahwa pemerintah tidak hanya bertugas mengatur dan melayani, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, administratif, dan hukum kepada masyarakat. Dari berbagai prinsip yang menjadi dasar *good governance*—seperti partisipasi, supremasi hukum, efektivitas, dan keadilan—transparansi serta akuntabilitas menjadi inti utama yang menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Tanpa keterbukaan dan tanggung jawab publik, tata kelola pemerintahan akan kehilangan legitimasi dan rentan terhadap praktik korupsi maupun penyalahgunaan wewenang.

Transparansi dapat dimaknai sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyediakan akses terhadap informasi publik yang relevan, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Keterbukaan ini tidak hanya sebatas pada penyampaian informasi, tetapi juga mencakup penyediaan data yang tepat waktu, lengkap, dan dapat diverifikasi. Dalam konteks pemerintahan modern, transparansi mencakup seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan program, penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan dan evaluasi hasil. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat terlibat aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta menilai sejauh mana kebijakan yang dibuat berpihak pada kepentingan publik. Dalam kerangka akuntabilitas sektor publik, transparansi berfungsi sebagai prasyarat utama agar mekanisme pertanggungjawaban dapat berjalan efektif, karena tanpa adanya informasi yang terbuka, masyarakat tidak memiliki dasar untuk melakukan pengawasan atau penilaian terhadap kinerja pemerintah.

Akuntabilitas publik, di sisi lain, merupakan kewajiban lembaga pemerintahan dan pejabat publik untuk menjelaskan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan, kebijakan, serta hasil yang dicapai kepada masyarakat. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur administratif, tetapi juga menyangkut tanggung jawab terhadap pencapaian hasil dan manfaat kebijakan publik. Dalam paradigma *New Public Management (NPM)*, akuntabilitas diukur berdasarkan efisiensi penggunaan sumber daya dan efektivitas dalam mencapai tujuan pembangunan. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi ukuran sejauh mana pemerintah mampu mengelola anggaran negara secara transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu, konsep transparansi fiskal juga menjadi landasan teoritis penting dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Transparansi fiskal mengharuskan pemerintah untuk menyampaikan seluruh informasi keuangan, kebijakan fiskal, serta proyeksi anggaran secara terbuka dan dapat dipercaya. Prinsip ini mencakup keterbukaan dalam penyusunan anggaran, pelaporan realisasi, hingga penyajian data utang publik dan subsidi. Tujuan dari transparansi fiskal adalah agar masyarakat, lembaga pengawas, serta pemangku kepentingan lainnya dapat menilai sejauh mana kebijakan fiskal dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berkesinambungan. Transparansi fiskal juga membantu mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan publik, sehingga memperkuat kepercayaan terhadap kredibilitas kebijakan fiskal dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dalam konteks Indonesia, penerapan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik mengalami perkembangan pesat sejak dimulainya reformasi birokrasi dan desentralisasi fiskal pada awal tahun 2000-an. Pemerintah kemudian memperkenalkan berbagai sistem berbasis teknologi informasi seperti Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), e-budgeting, dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk memperkuat integrasi data, efisiensi, serta keterbukaan dalam pengelolaan keuangan publik. Melalui sistem ini, proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan dapat diakses secara daring dan terpantau secara *real-time*, sehingga mengurangi potensi manipulasi data dan penyimpangan anggaran. Kebijakan digitalisasi keuangan publik ini sejalan dengan semangat *open government* yang menekankan pentingnya pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Lebih lanjut, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di Indonesia juga diperkuat oleh landasan hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh badan publik. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong terwujudnya sinergi antarinstansi melalui pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi. Melalui regulasi tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi birokrasi, memperkuat sistem pengawasan internal, dan memastikan setiap proses pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.

Dengan demikian, secara teoritis, transparansi dan akuntabilitas berperan sebagai fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Keduanya memiliki hubungan yang saling bergantung: transparansi menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk akuntabilitas, sementara akuntabilitas memastikan bahwa keterbukaan informasi digunakan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik. Dalam era digital saat ini, keberhasilan implementasi kedua prinsip tersebut sangat ditentukan oleh komitmen politik, kesiapan sumber daya manusia, serta dukungan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Oleh karena itu, integrasi antara aspek teoritis dan praktis dari transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, efisien, dan berintegritas di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*literature review*) dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan, baik dari jurnal nasional maupun internasional. Fokus kajian diarahkan pada penelitian yang membahas implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik melalui sistem *e-budgeting* di sektor pemerintahan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif perkembangan konsep dan praktik tata kelola keuangan publik berbasis digital, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya di berbagai konteks pemerintahan.

Pemilihan literatur dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi topik, kredibilitas sumber, dan tahun terbit antara 2020 hingga 2025. Rentang waktu tersebut dipilih untuk memastikan bahwa data dan temuan yang digunakan menggambarkan kondisi terkini penerapan *e-budgeting* dan dinamika kebijakan transparansi serta akuntabilitas publik. Sumber-sumber yang dikaji meliputi artikel ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh lembaga resmi, seperti pemerintah, lembaga keuangan publik, dan organisasi internasional.

Analisis terhadap literatur dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan menekankan pada identifikasi pola kesamaan, perbedaan, serta implikasi kebijakan dari setiap penelitian. Setiap temuan dianalisis berdasarkan keterkaitannya dengan prinsip *good governance* dan kerangka akuntabilitas publik di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam mengenai efektivitas *e-budgeting* dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang yang masih dihadapi dalam konteks pemerintahan daerah maupun nasional.

4. Conceptual Framework

Secara konseptual, keterkaitan antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik membentuk suatu sistem yang saling memperkuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi berfungsi sebagai landasan utama dengan menyediakan akses informasi yang terbuka, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Keterbukaan ini memungkinkan publik untuk mengetahui bagaimana sumber daya negara dialokasikan dan digunakan, khususnya dalam konteks pengelolaan anggaran publik. Ketika masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap informasi, mereka dapat menilai rasionalitas kebijakan, efektivitas program, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan demikian, transparansi bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga instrumen penting dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Partisipasi publik muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya transparansi yang efektif. Akses terhadap informasi mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan, evaluasi, dan pemberian umpan balik terhadap kebijakan pemerintah. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti konsultasi publik, forum musyawarah perencanaan pembangunan (*musrenbang*), survei kepuasan masyarakat, maupun pengawasan berbasis komunitas. Dalam perspektif teoritis, partisipasi publik berperan sebagai mekanisme kontrol sosial yang memperkuat fungsi akuntabilitas. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, semakin besar pula tekanan bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan penggunaan anggarannya secara transparan dan efektif. Dengan demikian, hubungan antara transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas bersifat timbal balik dan membentuk siklus yang memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, integrasi ketiga elemen ini semakin nyata melalui penerapan sistem digital seperti *e-budgeting*, *e-planning*, dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Melalui sistem ini, informasi anggaran dapat diakses secara *real-time*, sehingga publik dapat memantau proses penganggaran, pelaksanaan, dan realisasi belanja daerah secara langsung. Transparansi digital ini memperluas ruang partisipasi masyarakat, terutama dalam hal pengawasan penggunaan anggaran dan penilaian terhadap efektivitas program pembangunan. Selain itu, penerapan *e-budgeting* juga menciptakan jejak audit digital yang dapat ditelusuri, sehingga memperkuat integritas dan akuntabilitas aparatur pemerintah. Sistem digital ini tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai sarana transformasi budaya birokrasi menuju tata kelola yang lebih terbuka, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.

Namun demikian, keberhasilan integrasi antara transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas melalui sistem *e-budgeting* sangat bergantung pada beberapa faktor pendukung. Di antaranya adalah komitmen politik dari pimpinan daerah, kapasitas sumber daya manusia, kualitas infrastruktur teknologi informasi, serta budaya birokrasi yang mendukung keterbukaan dan kolaborasi. Tanpa dukungan tersebut, *e-budgeting* berpotensi hanya menjadi formalitas administratif tanpa memberikan dampak nyata terhadap peningkatan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, implementasi sistem digital harus diiringi dengan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi aparatur, serta edukasi publik agar masyarakat dapat memanfaatkan data dan informasi yang tersedia secara efektif.

Dengan demikian, kerangka konseptual penelitian ini menempatkan transparansi sebagai *enabler*, partisipasi publik sebagai *penguat*, dan akuntabilitas sebagai *output* utama dari sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Ketiga elemen ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diintegrasikan secara sinergis dalam setiap tahap pengelolaan keuangan publik. Dalam konteks Indonesia yang sedang bergerak menuju pemerintahan digital (*digital governance*), hubungan antara ketiganya menjadi semakin strategis untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang

dikeluarkan negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

5. Hasil dan Pembahasan

Penerapan sistem *e-budgeting* di Indonesia menandai langkah penting dalam transformasi pengelolaan keuangan publik menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Melalui sistem ini, proses penganggaran yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dikelola secara digital, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Digitalisasi ini memungkinkan seluruh tahapan anggaran terdokumentasi secara sistematis serta dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Dengan demikian, *e-budgeting* berfungsi tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat integritas dan efisiensi birokrasi.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi *e-budgeting* membawa dampak positif terhadap efisiensi dan akuntabilitas keuangan publik. Proses penganggaran yang semula memerlukan waktu berminggu-minggu kini dapat diselesaikan hanya dalam beberapa hari kerja. Selain mempercepat proses, sistem ini juga menciptakan jejak audit digital yang memungkinkan pengawasan internal dan eksternal dilakukan secara lebih efektif. Temuan-temuan ini membuktikan bahwa *e-budgeting* mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan serta mendukung penerapan prinsip-prinsip *good governance* di sektor publik.

Selain efisiensi, penerapan *e-budgeting* juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap data keuangan pemerintah secara real-time, termasuk rencana kegiatan, alokasi dana, dan pelaksanaan program. Hal ini memperkuat kepercayaan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Dalam konteks pemerintahan daerah, transparansi melalui *e-budgeting* menjadi wujud nyata dari komitmen terhadap pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab kepada publik.

Namun demikian, efektivitas penerapan *e-budgeting* masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian. Beberapa kendala yang sering muncul antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital aparatur, serta resistensi terhadap perubahan dari pegawai yang terbiasa dengan sistem manual. Selain itu, kualitas data yang diunggah ke dalam sistem juga sering kali belum optimal, sehingga menghambat analisis dan pengambilan keputusan. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan *e-budgeting* tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan budaya organisasi.

Faktor manusia menjadi elemen penting dalam menjamin keberlanjutan sistem *e-budgeting*. Pemerintah perlu melakukan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi digital para aparatur, serta membangun kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penganggaran. Strategi manajemen perubahan juga diperlukan agar adaptasi terhadap sistem digital dapat berjalan lebih efektif

dan diterima secara luas di seluruh unit kerja. Dengan demikian, *e-budgeting* tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bagian dari budaya kerja yang mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih.

Selain faktor internal, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah juga memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan transparansi dan akuntabilitas. Ketika masyarakat tidak percaya terhadap integritas pemerintah, keterbukaan informasi tidak akan efektif mendorong partisipasi publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik dan menyediakan ruang partisipatif melalui portal transparansi, forum konsultasi, atau layanan pengaduan daring. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dalam pengawasan anggaran.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa *e-budgeting* merupakan elemen penting dalam memperkuat tata kelola keuangan publik berbasis prinsip *good governance*. Hubungan antara transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas bersifat saling melengkapi dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berintegritas. Ketika transparansi meningkat melalui keterbukaan informasi, partisipasi publik pun tumbuh, dan akuntabilitas pemerintah dapat ditegakkan. Oleh karena itu, optimalisasi *e-budgeting* tidak hanya memerlukan dukungan teknologi, tetapi juga komitmen kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Tantangan Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas

Meskipun penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik menunjukkan kemajuan, masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di daerah dengan sumber daya terbatas. Keterbatasan jaringan internet, perangkat keras, dan keamanan data menyebabkan sistem digital seperti *e-budgeting* belum dapat berjalan optimal di seluruh wilayah Indonesia, sehingga keterbukaan informasi publik belum merata.

Kualitas dan validitas data keuangan juga menjadi persoalan penting. Informasi yang tidak akurat, tidak diperbarui, atau sulit dipahami dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem transparansi. Kurangnya kemampuan teknis aparatur dalam mengelola data turut memperburuk inkonsistensi informasi, yang pada akhirnya menghambat terciptanya akuntabilitas yang efektif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas data menjadi faktor kunci dalam memperkuat keandalan sistem keuangan publik.

Selain itu, aspek sumber daya manusia dan budaya birokrasi turut menjadi kendala signifikan. Masih banyak aparatur yang belum memiliki literasi digital yang memadai dan enggan beradaptasi dengan sistem baru. Resistensi terhadap perubahan serta kurangnya pemahaman akan manfaat digitalisasi menyebabkan penerapan *e-budgeting* sering hanya bersifat administratif tanpa dampak substantif terhadap tata kelola pemerintahan.

Dari sisi kelembagaan, lemahnya koordinasi antarinstansi dan pengawasan menjadi hambatan lain. Integrasi antara sistem pusat dan daerah yang belum sempurna menyebabkan tumpang tindih data dan

menghambat konsolidasi laporan keuangan. Pengawasan internal dan eksternal yang belum optimal membuka peluang bagi manipulasi data anggaran, sehingga diperlukan sistem audit digital yang lebih terintegrasi untuk menegakkan akuntabilitas.

Terakhir, rendahnya partisipasi dan kepercayaan publik juga menjadi tantangan besar. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai portal informasi, partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran masih rendah akibat minimnya literasi anggaran dan persepsi negatif terhadap pemerintah. Untuk itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan kapasitas SDM, serta membangun budaya birokrasi yang terbuka dan partisipatif agar transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud secara nyata.

Analisis Kritis

Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik merupakan bagian penting dari prinsip *good governance* yang menekankan keterbukaan, partisipasi, dan tanggung jawab. Di Indonesia, berbagai inovasi seperti *e-budgeting*, *SPAN*, dan *SIPD* telah diterapkan untuk memperkuat tata kelola keuangan publik. Namun, efektivitas sistem tersebut masih bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan integrasi antarinstansi, bukan hanya pada ketersediaan teknologi semata.

Dalam praktiknya, transparansi belum sepenuhnya menjamin peningkatan akuntabilitas. Meski informasi keuangan telah tersedia secara daring, masyarakat sering kali kesulitan memahami dan memanfaatkannya karena keterbatasan literasi anggaran dan format data yang kompleks. Akibatnya, transparansi hanya bersifat formal tanpa memberikan ruang pengawasan yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi perlu disertai dengan strategi komunikasi publik dan edukasi yang memadai.

Dari sisi birokrasi, penerapan sistem digital sering kali belum diikuti perubahan budaya kerja. Sebagian aparatur masih memandang transparansi sebagai kewajiban administratif, bukan tanggung jawab moral dan profesional. Kondisi ini menyebabkan digitalisasi anggaran hanya menjadi simbol modernisasi tanpa perubahan nyata dalam perilaku dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Selain itu, lemahnya sistem pengawasan dan tindak lanjut hasil audit juga menjadi hambatan. Walaupun lembaga pengawas seperti BPK dan Inspektorat telah berperan, penegakan sanksi terhadap pelanggaran masih terbatas. Tanpa mekanisme akuntabilitas yang kuat, transparansi berisiko hanya menjadi formalitas tanpa konsekuensi terhadap penyimpangan kebijakan atau keuangan.

Secara keseluruhan, keberhasilan transparansi dan akuntabilitas tidak hanya ditentukan oleh adanya sistem digital, tetapi juga oleh perubahan paradigma pemerintahan. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas lembaga, meningkatkan literasi publik, serta mendorong partisipasi masyarakat agar keterbukaan informasi benar-benar berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dapat berjalan beriringan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif, dan dipercaya masyarakat.

6. Implikasi Praktis dan Kebijakan

Secara praktis, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui sistem *e-budgeting* memberikan manfaat nyata dalam mempercepat proses penganggaran, meningkatkan efisiensi administrasi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Implementasi sistem ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk memantau alokasi dan penggunaan anggaran secara real-time, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Oleh karena itu, keberlanjutan digitalisasi keuangan daerah perlu dijaga dengan memperkuat infrastruktur teknologi dan memastikan interoperabilitas antarinstansi agar sistem dapat berfungsi secara terpadu.

Dari sisi kebijakan, pemerintah pusat dan daerah perlu menetapkan regulasi yang lebih komprehensif terkait standar transparansi dan pelaporan keuangan digital. Kebijakan tersebut harus mencakup tata kelola data, mekanisme pembaruan informasi, serta sanksi bagi instansi yang tidak mematuhi prinsip keterbukaan publik. Selain itu, diperlukan kebijakan nasional yang mendorong sinkronisasi antara *e-budgeting*, *e-procurement*, dan sistem keuangan daerah lainnya, agar tidak terjadi duplikasi data dan proses birokrasi yang berbelit.

Secara kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan implikasi penting dari temuan penelitian. Pemerintah perlu menginvestasikan anggaran dalam program pelatihan teknis dan literasi digital bagi aparatur, sehingga mereka mampu mengoperasikan sistem keuangan berbasis teknologi dengan efektif. Selain itu, dibutuhkan strategi manajemen perubahan yang mendorong budaya kerja terbuka, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, implementasi transparansi dan akuntabilitas tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari etika profesional birokrasi modern.

Bagi masyarakat, implikasi kebijakan yang perlu diperkuat adalah peningkatan literasi publik terkait keterbukaan anggaran. Pemerintah dapat mendorong partisipasi aktif warga melalui portal pengawasan, forum konsultasi publik, dan mekanisme pelaporan masyarakat berbasis digital. Langkah ini tidak hanya memperluas akses terhadap informasi keuangan, tetapi juga memperkuat kontrol sosial terhadap kebijakan fiskal. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

7. Kesimpulan

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik merupakan pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi sistem keuangan melalui *e-budgeting* mampu meningkatkan efisiensi, mempercepat proses penganggaran, serta memperkuat jejak audit digital yang mendorong keterbukaan dan pertanggungjawaban publik. Upaya ini menjadi wujud nyata reformasi birokrasi yang berorientasi pada peningkatan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Meskipun demikian, implementasi transparansi dan akuntabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek infrastruktur digital, kualitas data, dan kapasitas sumber daya manusia. Ketimpangan teknologi antara daerah, resistensi terhadap perubahan, serta lemahnya koordinasi antarinstitusi menjadi hambatan utama yang perlu segera diatasi. Selain itu, rendahnya partisipasi publik menunjukkan bahwa transparansi belum sepenuhnya diiringi dengan keterlibatan masyarakat yang aktif dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan fiskal.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan literasi digital aparatur dan masyarakat, serta pengembangan sistem audit berbasis digital yang terintegrasi. Reformasi kelembagaan juga harus diarahkan pada pembentukan budaya birokrasi yang terbuka, kolaboratif, dan adaptif terhadap inovasi. Dengan pendekatan tersebut, sistem *e-budgeting* tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga instrumen strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efisien.

Secara keseluruhan, keberhasilan penerapan transparansi dan akuntabilitas tidak dapat dicapai hanya melalui inovasi teknologi, tetapi juga melalui komitmen moral, politik, dan institusional dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat perlu bersinergi dalam membangun ekosistem tata kelola yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan demikian, penerapan *e-budgeting* dan digitalisasi keuangan publik di Indonesia dapat menjadi fondasi kuat menuju pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Arini, S., & Nasehati, S. (2022). Analisis Implementasi E-Budgeting Dalam Mendukung Transparansi Pada Pemerintah Kota Surakarta. *Manajemen*.
<https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i2.175>.
- Arianto, A., Amanda, A., Fadhilah, A., Nur Fadila Qomari, F., Faizul Candra, I., Putri, M., & Saputra, B. (2025). E-Budgeting Implementation on Public Financial Transparency and Accountability At the Communication and Information Department of Padang City. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 22(2), 191–202. <https://doi.org/10.46730/jiana.v22i2.8253>
- Ayu Wananda, N., Joni Pambelum, Y., Soraida, S., Ekonomi Dan Bisnis Universitas Palangka Raya, F., Alamat, I., & T. (2025). Pengaruh Implementasi E-Budgeting, E-Procurement, Komitmen Organisasi, dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Empiris pada Dinas Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah). *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 421–438.
<https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/gemilang>
- Bisogno, M., Cuadrado-Ballesteros, B., & Santis, S. (2022). Do e-government initiatives and e-participation affect the level of budget transparency?. *International Public Management Journal*, 25, 365 - 391.
<https://doi.org/10.1080/10967494.2022.2042437>.
- Fachrulla, A., Arifuddin Mas'ud, & Mulyati Akib. (2025). Literature Study on

- the Role of E-Budgeting in Increasing APBD Transparency. *Journal of Scientific Interdisciplinary*, 2(2), 1–7. <https://doi.org/10.62504/jsi1233>
- Gapal, L., & Suryani, P. (2024). Menyoroti peran audit internal pemerintah dalam meningkatkan praktik e-budgeting di Kota Bengkulu. *Jurnal Seni Digital & Humaniora*. https://doi.org/10.33847/2712-8149.5.1_6.
- Jung, H. (2022). Online Open Budget: The Effects of Budget Transparency on Budget Efficiency. *Public Finance Review*, 50, 91 - 119. <https://doi.org/10.1177/10911421221093412>.
- Oktaviani, R. F., Puspaningtyasfaeni, D., & Puspitaningtyasfaeni, R. (2019). E-Budgeting for Public Finance Transparency and Accountability. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(2S4), 854–857. <https://doi.org/10.35940/ijrte.b1170.0782s419>
- Rafiqi, I., & Selviyanti, N. (2021). Efektivitas Implementasi e-Budgeting dalam Mewujudkan Good Governance dengan Model CIPP (Studi Kasus pada Kota Surabaya). , 1, 1-24. <https://doi.org/10.28944/assyarikah.v1i2.381>.
- Taiwo, K. (2024). Information Technology and Governance: Does E-governance Aid Budget Transparency? *Journal of Development Policy and Practice*, 10(2), 230-251. <https://doi.org/10.1177/24551333241242195>